

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, data-data yang telah dikumpulkan, dan analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung dalam membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah periode tahun 2001-2008 pada umumnya masih rendah, yaitu di bawah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung pada umumnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Namun rasio kemandirian pemerintah kabupaten/kota di Lampung memiliki trend atau kecenderungan meningkat walaupun dengan besaran yang kecil.
2. Kemampuan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung pada pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2008 dalam merealisasikan penerimaan daerahnya pada umumnya dikategorikan efektif karena realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing Kabupaten dan Kota rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun rasio efektifitas memiliki kecenderungan untuk menurun.

3. Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung tahun anggaran 2002 sampai 2008, dilihat dari rata-rata rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung sangat fluktuatif. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan PAD memiliki trend semakin menurun.
4. Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung mengalami pertumbuhan positif. Namun pertumbuhan yang positif tersebut memiliki kecenderungan untuk semakin menurun. Agar dapat tetap menjaga pertumbuhan pendapatannya, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung harus mencari sumber-sumber pendapatan baru, selain dari PAD dan Dana Perimbangan.
5. Penerimaan PAD dan Non-PAD berpengaruh positif pada tingkat kemandirian suatu daerah, dengan pola hubungan searah, yaitu apabila penerimaan PAD dan Non-PAD meningkat akan meningkatkan pula kemandirian suatu daerah dan sebaliknya. Selain itu tingkat kemandirian Pemerintah Kota lebih tinggi dari pada Pemerintah Kabupaten.
6. Kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001 memberikan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Kemampuan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam pengelolaan daerahnya dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan terhadap APBD yang digunakan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pertumbuhan PAD dan pendapatan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian adalah adanya keterbatasan data yang diperoleh penulis yang disebabkan oleh penggunaan data sekunder dalam penelitian. Hal ini mengakibatkan beberapa analisis rasio, seperti Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Belanja Rutin/Operasional terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Rasio Belanja Pembangunan/Modal terhadap APBD, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin/Operasional, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan/Modal, yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, tidak dapat dihitung. Selain itu pengambilan data yang terbatas, yaitu 8 tahun, antara tahun 2001 sampai dengan 2008, yang mengakibatkan hasil analisa kurang memberikan gambaran yang sesungguhnya.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung perlu meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah, selain Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung perlu mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) guna mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan PAD dan pendapatan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung masih cukup rendah

meskipun memiliki tingkat pertumbuhan positif namun menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung harus mencari sumber-sumber pendapatan baru, selain dari PAD dan Dana Perimbangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat.

3. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung hendaknya lebih memperhatikan potensi yang dimiliki daerahnya sehingga dalam penyusunan anggaran daerah, target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (dalam batas rasional) sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.
4. Melakukan perbaikan sistem penagihan dan administrasi dalam pengelolaan dan pengawasan PAD, sebab mekanisme pengelolaan pajak daerah pada beberapa pemerintah daerah di Lampung masih belum sesuai dengan peraturan daerah atau bila diperlukan menyesuaikan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor pengeluaran Pemerintah Daerah guna mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah telah cukup untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan sosial terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan data yang diperoleh penulis akibat penggunaan data sekunder dalam penelitian.